

Peran TUN Dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Di Indonesia

Muhamad Dhanu Armanto¹⁾, Evan Javier Nathaniel Manampiring²⁾, Thierry³⁾

Universitas Tarumanagara
Jalan Letjen S. Parman No. 1, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Indonesia

Muhamad.205240112@stu.untar.ac.id 1)
thierry.205240221@stu.untar.ac.id 2)
evan.205240110@stu.untar.ac.id 3)

Abstrak

Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) memiliki peranan signifikan dalam mendorong tercapainya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Melalui fungsi pengawasan atas setiap keputusan administratif, TUN memastikan kebijakan pemerintah tetap sesuai aturan, tidak merugikan masyarakat, serta memperhatikan aspek lingkungan. Berbagai perkara—seperti pembatalan izin lingkungan PT Semen Indonesia di Rembang hingga sengketa izin pertambangan dan perkebunan menunjukkan posisi TUN sebagai pengendali terhadap keputusan pemerintah yang berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekologis. Kehadiran TUN memberikan sarana hukum bagi masyarakat untuk mempersoalkan kebijakan yang dinilai mengabaikan kepentingan publik. Dengan demikian, TUN tidak hanya melindungi warga dari tindakan yang sewenang-wenang, tetapi juga memastikan pembangunan berjalan selaras antara kepentingan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

Kata kunci: Peradilan Tata Usaha Negara, pembangunan berkelanjutan, izin usaha, lingkungan hidup, kebijakan pemerintah

Abstract

The Administrative Court (TUN) plays a significant role in supporting sustainable economic development in Indonesia. By reviewing and supervising governmental administrative decisions, the court ensures that policies remain lawful, fair, and attentive to both public and environmental interests. Cases such as the revocation of PT Semen Indonesia's environmental permit in Rembang and various mining or plantation disputes illustrate the court's role as a check on government actions that may cause social or ecological harm. The TUN also provides citizens with a legal mechanism to contest decisions that fail to consider broader societal impacts. Consequently, the court not only safeguards individuals from arbitrary state actions but also helps maintain a balance between economic progress, environmental protection, and social welfare.

Keywords: Administrative Court, sustainable development, business permits, environmental protection, government policy

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi berkelanjutan kini menjadi salah satu fokus utama dalam agenda pembangunan nasional Indonesia. Di tengah tuntutan global akan pembangunan yang ramah lingkungan dan berorientasi jangka panjang, Indonesia berusaha mengimbangi kebutuhan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan terhadap kepentingan publik. Pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan

di berbagai sektor strategis, seperti industri, infrastruktur nasional, dan pengelolaan sumber daya alam, sehingga diharapkan mampu memperkuat perekonomian nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meski demikian, percepatan pembangunan tidak jarang menimbulkan persoalan baru. Dalam praktiknya, benturan kepentingan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal masih sering terjadi akibat proses pengambilan keputusan yang kurang transparan dan tidak sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat. Banyak kebijakan atau izin usaha diterbitkan dengan prioritas pada keuntungan ekonomi jangka pendek, sementara aspek sosial, ekologis, dan keberlanjutan kurang diperhatikan. Kondisi tersebut dapat memunculkan berbagai dampak negatif, seperti kerusakan lingkungan, munculnya konflik sosial, ketimpangan dalam penerimaan manfaat pembangunan, hingga timbulnya ketidakpastian hukum yang justru dapat menghambat tujuan pembangunan itu sendiri.

Dalam situasi inilah Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) menjadi sangat penting. Lembaga ini berfungsi sebagai pengawas yudisial yang menilai apakah keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan sesuai dengan hukum administrasi yang berlaku. Melalui peran tersebut, TUN membantu memastikan bahwa kebijakan publik tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga berpihak pada keadilan dan hak masyarakat. Ketika warga merasa dirugikan oleh keputusan pemerintah, Peradilan TUN memberikan ruang untuk menuntut keadilan secara legal. Kasus-kasus seperti sengketa izin lingkungan PT Semen Indonesia di Rembang menjadi contoh nyata bagaimana TUN dapat mengoreksi keputusan pemerintah yang dianggap tidak memperhatikan prinsip keberlanjutan dan keadilan.

Selain berfungsi menyelesaikan sengketa administratif, TUN juga memiliki peran lebih luas dalam membentuk arah kebijakan publik yang lebih akuntabel. Putusan-putusan yang dikeluarkannya dapat menjadi pedoman bagi pemerintah untuk bertindak lebih hati-hati dan taat pada prinsip good governance. Dengan demikian, TUN berkontribusi dalam memastikan bahwa pembangunan tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan konsekuensi sosial dan ekologis agar pembangunan tidak menghasilkan masalah baru yang lebih kompleks di masa depan.

Oleh karena itu, keberadaan TUN sangat relevan bagi Indonesia dalam mewujudkan pembangunan yang adil, seimbang, dan berkelanjutan. Melalui mekanisme kontrol hukum yang dimilikinya, TUN membantu mengarahkan pembangunan nasional agar tetap berada dalam koridor hukum, menjaga keharmonisan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat secara keseluruhan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis terhadap konsep hukum dan praktik peradilan yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yang mencakup penelusuran literatur hukum, peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, serta putusan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) yang relevan. Selain itu, penelitian ini menggunakan analisis dokumen kasus, terutama terhadap sengketa izin lingkungan PT Semen Indonesia di Rembang sebagai contoh penerapan kewenangan TUN dalam menguji kebijakan pemerintah.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis tematik, yaitu dengan mengidentifikasi pola dan tema utama terkait peran TUN, prinsip pembangunan berkelanjutan, serta aspek legalitas dalam pengambilan keputusan administrasi

negara. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menyusun pemahaman komprehensif mengenai bagaimana TUN berkontribusi dalam mengawasi kebijakan pembangunan agar tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan perlindungan kepentingan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran TUN dalam Mengawasi Kebijakan Pemerintah

Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) memiliki fungsi utama untuk mengontrol agar setiap keputusan pemerintah tetap sesuai aturan hukum administrasi. Dalam praktiknya, pemerintah sering menerbitkan kebijakan atau izin usaha yang lebih berat ke arah kepentingan ekonomi jangka pendek, sementara dampak terhadap masyarakat dan lingkungan kurang diperhatikan. Kondisi ini sering memunculkan konflik, misalnya dalam kasus izin lingkungan PT Semen Indonesia di Rembang, di mana masyarakat menilai pemerintah mengabaikan aspek keadilan dan dampak ekologis.¹

Melalui TUN, masyarakat punya ruang untuk menggugat dan meminta evaluasi terhadap kebijakan pemerintah tersebut. Jika sebuah keputusan dianggap melanggar asas keterbukaan, keadilan, atau tidak sesuai aturan hukum, TUN dapat membatalkannya. Fungsi ini membuat TUN menjadi lembaga yang berperan sebagai “pengawas” agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang ketika mengeluarkan keputusan penting.

Adapun peran TUN dalam Menjaga Pemerintahan dari Penyalahgunaan Wewenang (*Detournement de Pouvoir*) yang diatur dalam Pasal 17 ayat (2) dan (3) UU No. 30 Tahun 2014 . terutama setelah lahirnya UU Administrasi Pemerintahan yang memberikan ruang bagi pejabat untuk meminta penilaian serta memungkinkan hakim membatalkan tindakan administratif yang melampaui atau menyalahgunakan kewenangan.²

TUN juga dapat mengawasi mengawasi diskresi (*Discretionary Power*) agar Tidak disalahgunakan. diskresi sering digunakan pemerintah untuk menjalankan pelayanan publik atau mengambil keputusan mendesak. Namun diskresi rawan melanggar hukum jika tidak memenuhi syarat. peraturan ini diatur dalam Pasal 22–26 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. TUN ini sendiri berwenang menilai penggunaan diskresi apabila bertentangan dengan tujuan peraturan, tidak memenuhi prosedur, dan menyebabkan kerugian publik.³

Peran TUN dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) sebenarnya punya peran yang penting banget dalam menjaga arah pembangunan supaya tetap berkelanjutan. Berdasarkan kewenangan PTUN yang dijelaskan di Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986,⁴ pengadilan ini bisa mengecek dan menguji keputusan administrasi pemerintah. Jadi, semua bentuk kebijakan atau perizinan mulai dari izin usaha, investasi, sampe izin lingkungan harus sesuai aturan dan masuk kategori Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dijelaskan di Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009.⁵

Nah, kalau ada keputusan pemerintah yang ngerugiin masyarakat, merusak lingkungan, atau

¹ Sari, R. (2020). *Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam Perlindungan Lingkungan*. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik.

² Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 (Perubahan atas UU 5/1986)

³ Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

⁴ Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

⁵ Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009

nggak sesuai prosedur, masyarakat bisa banget ngajuin gugatan ke PTUN. Hal ini dijamin di Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986.⁶ Dari sini, PTUN bantu banget buat ngebangun kepastian hukum yang dibutuhkan dunia usaha, tapi di saat yang sama tetap ngelindungi kepentingan publik.

Selain itu, adanya PTUN bikin pemerintah jadi lebih hati-hati dalam ngeluarin keputusan. Pemerintah terdorong buat kerja dengan lebih transparan, akuntabel, dan profesional karena tau setiap keputusannya bisa digugat. Ini penting banget buat narik investasi yang sehat dan bertanggung jawab. Pada akhirnya, PTUN berfungsi kayak "penyeimbang" pembangunan jalan terus, tapi tetap memperhatikan lingkungan dan keadilan sosial.

Pembangunan ekonomi di Indonesia memang berkembang cepat, terutama di sektor industri,⁷ pertambangan, dan perkebunan. Namun, percepatan tersebut juga memunculkan masalah seperti kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan ketidakpastian hukum.⁸ Ketika kebijakan pemerintah lebih berpihak pada investor dibanding kepentingan masyarakat, maka keberadaan TUN menjadi sangat penting.

TUN membantu memastikan bahwa pembangunan tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Sengketa yang masuk ke TUN—terutama yang berkaitan dengan izin pertambangan, perkebunan, atau izin lingkungan—membuktikan bahwa lembaga ini turut menjaga agar pembangunan tetap berjalan sesuai prinsip keberlanjutan.⁹

No aspek		pembangunan berkelanjutan
1	ekonomi	pembangunan tetap berjalan
2	lingkungan	ekosistem tetap terjaga
3	sosial	hak masyarakat tetap dihormati

Posisi TUN sebagai lembaga penjamin keadilan administrasi menjadikannya salah satu pilar penting dalam menjaga arah pembangunan nasional agar tidak merugikan generasi mendatang.¹⁰

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) menempati posisi penting dalam memastikan bahwa praktik administrasi pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum. Melalui fungsi pengawasan yudisial, TUN tidak hanya menilai legalitas suatu keputusan, tetapi juga mendorong agar setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mencerminkan akuntabilitas, transparansi, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat. Dalam konteks pembangunan nasional yang bergerak cepat dan sering kali berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, kehadiran TUN menjadi penyeimbang yang memastikan bahwa percepatan pembangunan tidak menimbulkan kerugian sosial maupun ekologis.

⁶ Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986

⁷ Dedy Suhendra, Sutan Siregar, and Najwa Rosepty Miranda, "Konsep Perubahan Hukum Dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi" 8 (2024): 278–84.

⁸ Purnama, D., & Rachmawati, E. (2019). *Dampak Lingkungan dari Pembangunan Industri di Indonesia*. Jurnal Lingkungan dan Pembangunan.

⁹ Sutoro, A. (2015). *Kebijakan Publik dan Benturan Kepentingan*. Jurnal Ilmu Pemerintahan.

¹⁰ Brundtland, G. H. (1987). *Our Common Future*. Oxford University Press.

Sengketa-sengketa yang diajukan ke PTUN, khususnya terkait izin lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam, menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan mekanisme koreksi yang efektif terhadap keputusan pemerintah. Proses peradilan ini memperlihatkan bahwa TUN bukan hanya menyelesaikan sengketa individual, tetapi juga memainkan peran struktural dalam memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan. Dengan demikian, TUN berkontribusi memperkuat kepastian hukum, menjaga integritas administrasi pemerintahan, dan memastikan bahwa pembangunan berjalan sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial.

Saran

Pertama, pemerintah sebaiknya meningkatkan kualitas regulasi serta mekanisme dalam mengeluarkan keputusan administratif, terutama yang menyangkut lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Proses pembuatan kebijakan harus dilakukan secara terbuka, berbasis bukti ilmiah, dan melibatkan masyarakat sejak awal agar potensi konflik dapat diminimalisir.

Kedua, pejabat administrasi negara perlu memperdalam pemahaman mengenai AUPB dan ketentuan dalam UU Administrasi Pemerintahan. Penguatan kapasitas melalui pelatihan khusus mengenai teknik penyusunan keputusan, penggunaan diskresi yang tepat, dan mitigasi risiko kebijakan akan membantu mencegah lahirnya keputusan yang rentan digugat.

Ketiga, PTUN perlu terus memperkuat kelembagaan dan kompetensi internal, terutama dalam menangani sengketa yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Hakim TUN perlu dibekali pengetahuan tambahan mengenai hukum lingkungan, analisis dampak pembangunan, dan isu-isu ekologis agar putusan yang dihasilkan tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan dan keadilan lingkungan.

Keempat, masyarakat serta organisasi masyarakat sipil perlu lebih aktif memanfaatkan PTUN sebagai jalur kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Edukasi hukum kepada masyarakat masih penting dilakukan agar mereka memahami hak gugat yang dimiliki, sehingga akses terhadap keadilan dapat dirasakan secara lebih luas dan merata.

Secara keseluruhan, TUN harus terus diperkuat sebagai bagian penting dari mekanisme checks and balances dalam negara hukum Indonesia. Dengan pengawasan yang efektif, arah pembangunan nasional dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pertama-tama, penulis berterima kasih kepada bapak Dr. Moody Rizqy Syailendra Putra, S.H., M.H. selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Perdata, Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik penegakan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Brundtland, G. H. (1987). *Our Common Future*. Oxford University Press.

Purnama, D., & Rachmawati, E. (2019)

Dampak Lingkungan dari Pembangunan Industri di Indonesia. Jurnal Lingkungan dan Pembangunan.

- Sari, R. (2020). *Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam Perlindungan Lingkungan*. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik.
- Sutoro, A. (2015). *Kebijakan Publik dan Benturan Kepentingan*. Jurnal Ilmu Pemerintahan.
- Suhendra, Dedy, Sutan Siregar, and Najwa Rosepty Miranda. "Konsep Perubahan Hukum Dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi" 8 (2024): 278–84.
- Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 (Perubahan atas UU 5/1986)
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/46914/uu-no-5-tahun-1986>
- Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38851/uu-no-51-tahun-2009>
- Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/46914/uu-no-5-tahun-1986>